

## SUMMARY

# PENERAPAN PERAN BADAN PERMUSYARAWATAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

Created by SEMUEL MUDJA

**Subject** : badan permusyawaratan desa, peraturan desa  
**Subject Alt** : Village Consultative bodies, village regulations  
**Keyword** : Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Legal Decision Making, Peraturan Desa

### Description :

Bahwa dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa pasal 55 huruf (a) Menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi “Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa”. sesuai dengan hasil survey penulis bahwa di kecamatan Loloda secara keseluruhan belum mengikuti prosedur normativ sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa. Karena dalam kenyataannya, Pemerintah Desa untuk membuat satu peraturan desa mereka bekerja sama dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah untuk menggunakan jasa pihak ketiga dalam membuat peraturan desa tersebut. Padahal secara normativ berdasarkan pasal 55 huruf (a) diatas adalah kewenangan BPD untuk merancang peraturan desa bersama kepala desa dan dapat mensosialisasikan peraturan desa tersebut kepada masyarakat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Proses penyusunan dan penetapan peraturan Desa Kec.Loloda, Kab. Halmahera Barat, Propinsi. Maluku Utara?(2) Kendala apa saja yang dihadapi BPD Kec. Loloda, Kab. Halmahera Barat, Propinsi. Maluku Utara dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan desa? Penelitian ini bertujuan: (1) Mendeskripsikan peran BPD Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2) Mendeskripsikan Implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap peran BPD dalam proses penyusunan dan penetapan Perdes di Kecamatan Loloda (3) Mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi oleh BPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah bersifat Yuridis Sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah: (1) metode wawancara, (2) metode dokumen. Sedangkan metode analisa digunakan adalah metode analisa diskritif Yuridis Empiris dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan Peraturan Desa sudah dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang benar akan tetapi belum maksimal sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Peraturan Mendagri No 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, yakni melalui tahap inisiasi, sosio-politis dan yuridis. Simpulan dari hasil penelitian di atas adalah BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi yaitu proses pembuatan Peraturan Desa telah sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang ada namun fungsi legislasi BPD belum dapat berjalan secara maksimal, hal ini ditunjukkan dengan kurang komprehensipnya BPD di Kecamatan Loloda dalam membingkai peraturan-peraturan desa yang masih bersifat konvensional atau kebiasaan kedalam bentuk peraturan tidak tertulis. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yakni secara Intern dan Ekstern. Sehingga saran yang diajukan dalam Tesis ini ialah perlu adanya perhatian khusus dari PEMDA serta perlu diadakanya pelatihan cara menyusun dan merancang Perdes bagi Pemerintah Desa.

**Contributor** : Wasis Susetio  
**Date Create** : 02/03/2017  
**Type** : Text  
**Format** : PDF  
**Language** : Indonesian

**Identifier** : UEU-Master-201404033  
**Collection** : 201404033  
**Source** : Master Theses of Law  
**Relation Collection** Fakultas Hukum  
**COverage** : Civitas Akademi Universitas Esa unggul  
**Right** : @perpustakaan universitas esa unggul

**Full file - Member Only**

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

**Contact Person :**

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid ( astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id )

Supervisor